

STUDI IMPLEMENTASI

DR. NOVITA TRESIANA

MATERI

- 1. Mengapa Lebih Banyak Kebijakan Yang Gagal Ketimbang Berhasil?**
- 2. Konseptualisasi Implementasi**
- 3. Dua Pendekatan Implementasi**

FENOMENA/REALITAS IMPLEMENTASI SEBAGAI BAHAN KAJIAN

1. **MENGAPA** suatu kebijakan yang sudah dirumuskan dengan baik, dengan melalui proses deliberasi yang panjang, kemudian gagal diimplementasikan ?, padahal aliran dikotomi politik-administrasi , tahapan yang paling sulit dalam membuat kebijakan adalah merumuskan kebijakan. Sedangkan tahapan implementasi adalah mudah.

REALITAS:

CONTOH:

2. **MENGAPA** suatu kebijakan nasional yang sama diimplementasikan oleh pemerintah daerah memiliki variasi keberhasilan implementasi yang berbeda-beda?

REALITAS:

CONTOH :

3. **MENGAPA** suatu jenis kebijakan tertentu lebih mudah/lebih berhasil diimplementasikan dibanding dengan yang lain?

REALITAS :

CONTOH :

SEJARAH / TOKOH UTAMA

STUDI Pressman dan Wildavsky (1973) “Implementation”

Pada tahun 1968, MENELITI upaya yang dilakukan oleh **Economic Development Administration (EDA)** di Oakland, California untuk mengimplementasikan program pembangunan ekonomi untuk perkotaan. **HASILNYA** : terjadi problem implementasi, Bukan di formulasi

“

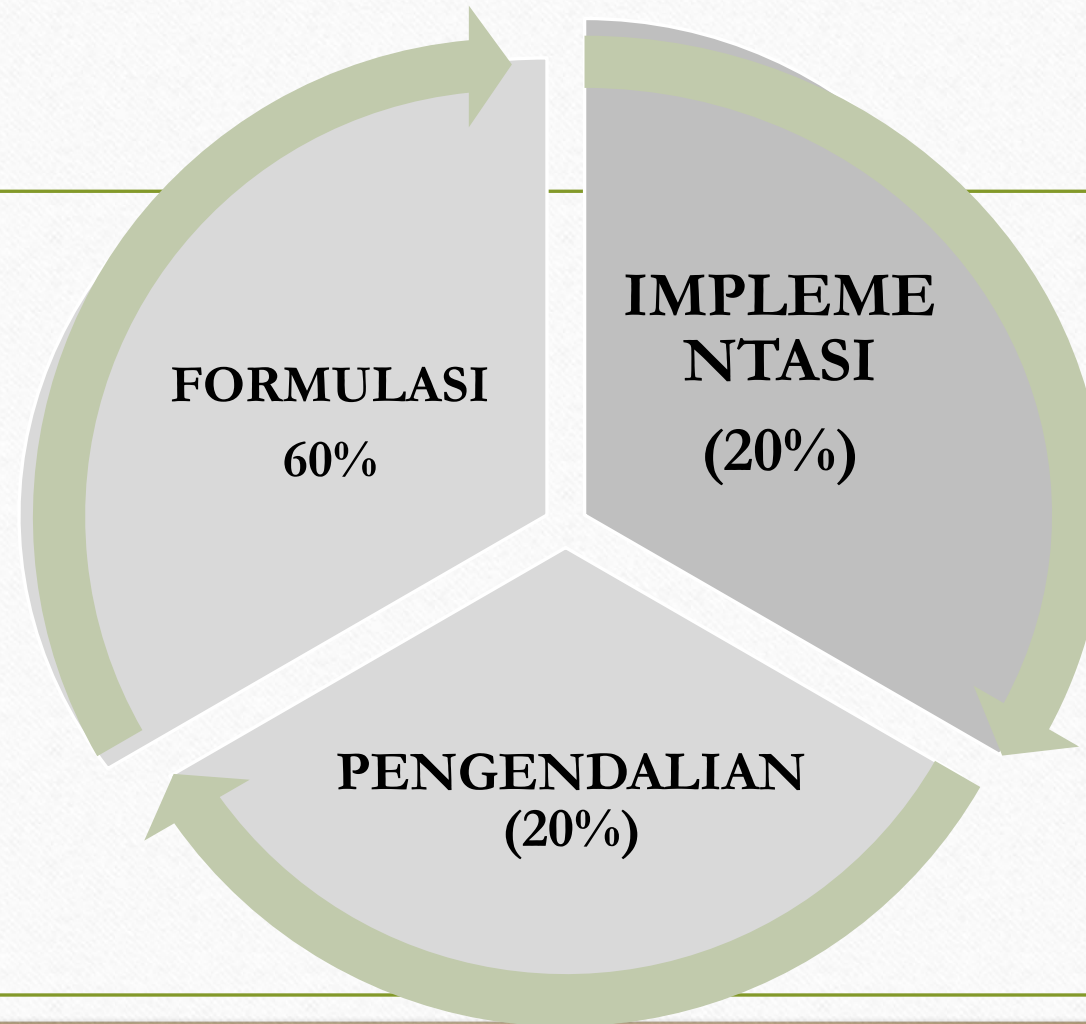
Mengapa Lebih Banyak Kebijakan Yang Gagal Ketimbang Berhasil?

1. STUDI PRESMAN DAN WILDAVSKY (1970)/TOKOH IMPLEMENTASI

“STUDI MEMAHAMI MENGAPA IMPLEMENTASI BERBAGAI PROGRAM YG DIRANCANG PEMERINTAH PUSAT CENDERUNG GAGAL KETIKA DIIMPLEMENTASIKAN DI PEMERINTAH LOKAL, TERJADI SAMPAI HARI INI, didapati DOKUMEN KEBIJAKAN MANDEG KETIKA BERHADAPAN DENGAN REALITAS LAPANGAN”

2. *GRINDLE (1980) Politics and Policy Implementation in the Third World*

MENGAPA LEBIH BANYAK KEBIJAKAN YANG GAGAL KETIMBANG BERHASIL?



FAKTOR-FAKTOR DISINYALIR PENYEBAB KEGAGALAN KEBIJAKAN

CONTOH:

PENYEBAB KEGAGALAN PROGRAM ANTI KEMISKINAN ADALAH:

1. MASALAH KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME
2. PENYERAGAMAN KEBIJAKAN
3. LEMAHNYA DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH/DESA
4. RENDAHNYA PENGETAHUAN KELOMPOK SASARAN

PROBLEM INFODEMIC DALAM MERESPON PANDEMI COVID-19

Narasumber:
Hermin Indah Wahyuni
Kuskridho Ambardi

Perumus:
Poppy S. Winanti
Wawan Mas'udi

Sumber foto diambil:
<https://whonewsainipublishing.com/when-the-infodemic-spreads-faster-than-the-virus/>

"Infodemic...spreads faster and more easily than this virus"
(Tedros Adhanom Ghebreyesus,
Direktur Jenderal - World Health Organization (WHO))

Kutipan dari pernyataan Direktur Jenderal WHO di awal tulisan ini mencerminkan persoalan krusial yang dihadapi pemerintah dan masyarakat dalam penanganan COVID-19. Tidak hanya bagaimana berjuang menangani virus itu sendiri, namun yang tidak kalah pentingnya adalah melawan atau mengatasi yang disebut sebagai *infodemic* ketika wabah COVID-19 melanda. *Infodemic* secara sederhana dapat dimaknai sebagai informasi yang berlebihan dan tidak dapat dilacak kebenarannya, terutama yang beredar dan berkembang pada saat situasi darurat kesehatan. Situasi ini kemudian diperparah dengan ketidakmampuan pemerintah sebagai otoritas yang berwenang untuk menyediakan informasi yang akurat dan dapat menjadi pegangan masyarakat luas.

Hasil kajian Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) yang dirilis pada tanggal 7 April 2020 lalu menunjukkan sejumlah pernyataan blunder pejabat pemerintah Indonesia terkait wabah COVID-19. Mulai dari menganggap remeh tingkat urgensi maupun dampaknya terutama di awal ketika wabah ini muncul, hingga ketidakselarasan pernyataan yang disampaikan para pejabat tinggi negara yang memunculkan kebingungan di masyarakat. Temuan-temuan tersebut merefleksikan ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola informasi dan komunikasi publik secara tepat di masa krisis pandemi. *Policy brief* ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan, bagaimana komunikasi publik yang efektif dikembangkan oleh pemerintah di tengah merebaknya *infodemic* dalam pengelolaan COVID-19?

Contact Person : +62 822 2074 2201 (Media FISIPOL UGM)

Urgensi Komunikasi Publik pada Masa Krisis Kesehatan

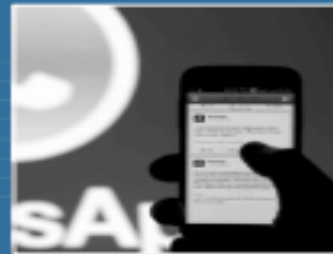
Komunikasi publik yang efektif menjadi garda terdepan dari upaya untuk memberikan informasi yang akurat, menumbuhkan kepercayaan dan rasa aman kepada publik dalam situasi krisis. Pemerintah dituntut agar dapat menjadi rujukan informasi yang otoritatif bagi masyarakat, di tengah situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Tersedianya sumber informasi yang terpercaya semakin krusial, mengingat arus informasi yang kian tak terbendung karena kemajuan teknologi informasi yang pesat. Informasi dapat tersebar dengan cepat melalui media sosial dan kerap kali mengaburkan antara informasi yang akurat dengan misinformasi yang justru menyesatkan.

Ada beberapa urgensi yang dapat diidentifikasi dari kebutuhan pengelolaan komunikasi publik yang efektif di masa krisis COVID-19.

Pertama

Carut Marut Komunikasi Publik di Tengah Masa Krisis

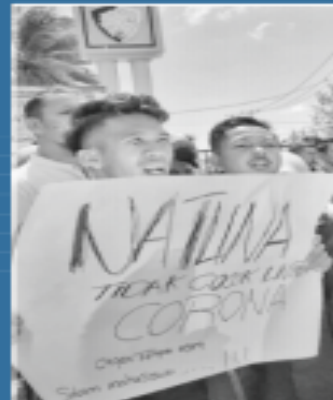
Situasi ini melahirkan kekacauan informasi publik atas situasi krisis, yang akan menyebabkan tidak hanya tergerus, bahkan hilangnya kepercayaan publik terhadap kredibilitas pemerintah, namun juga akan melahirkan kebingungan di tengah masyarakat. Krisis komunikasi publik semacam ini akan memperdalam kerentanan masyarakat akibat krisis yang berlangsung. Lebih jauh, kondisi ini memberi peluang bagi tumbuh suburinya *infodemic* yang bisa berdampak lebih buruk dibandingkan pandemi itu sendiri.



Kedua

Kegagalan Masyarakat Menangkap Informasi yang Akurat

Kegagalan pemerintah mengelola komunikasi publik yang efektif mengakibatkan publik kehilangan kemampuan untuk memahami persoalan secara akurat dan terpercaya, terutama untuk membantu mereka menyikapi wabah dengan tepat. Informasi yang akurat dapat menjadi basis bagi masyarakat bertindak dan merespon situasi krisis dengan lebih baik. Sebaliknya misinformasi dapat menjauhkan masyarakat dari solusi yang tepat dalam merespon wabah, bahkan dapat memperparah situasi. Kesalahpahaman tentang pola penyebaran virus misalnya, justru dapat menyebabkan masyarakat ikut berperan menyebarkan virus. Pun halnya informasi yang tidak komprehensif atas prosedur pemukiman korban COVID-19 misalnya, justru melahirkan reaksi masyarakat yang berlebihan dan tidak pada tempatnya. Ketidakjelasan pesan informasi publik yang disampaikan pemerintah, akan menyebabkan masyarakat gagal memahami persoalan krisis secara tepat.





Ketiga

Terhambatnya Implementasi Kebijakan Akibat Kelemahan Komunikasi Publik

Komunikasi publik menjadi kunci dalam proses kebijakan krisis, untuk memastikan pesan kebijakan secara cepat dan tepat ditangkap oleh berbagai pihak terkait, baik di internal maupun eksternal pemerintahan. Ketidakmampuan pemerintah untuk mengelola komunikasi publik terkait dengan kebijakan yang diambil, akan berdampak pada terhambat dan bahkan gagalnya implementasi kebijakan penanganan pandemi. Lemahnya komunikasi publik dalam konteks kebijakan ini ditunjukkan dengan ketidakselarasan pernyataan antar pejabat publik yang berwenang, sehingga menyulitkan proses implementasi kebijakan. Ketidakjelasan informasi mengenai perlu tidaknya lockdown, dilarang atau tidak dilarangnya mudik sebagai contoh, menunjukkan kelemahan komunikasi publik yang berpengaruh pada implementasi.



Keempat

Tidak Adanya Kanal Tunggal Informasi Publik

Di awal krisis COVID-19, yang berkembang adalah multiple sources of information, baik yang berbasis informasi daerah dan nasional, maupun antar lembaga. Selain itu, tidak ada satu rujukan kanal informasi (misalnya dalam bentuk official website) yang sedari awal dipersiapkan oleh pemerintah yang memuat berbagai informasi terkait dengan COVID-19. Tidak adanya rujukan informasi membuat berbagai pihak mengambil langkah-langkah mandiri yang tidak sepenuhnya berbasis data yang akurat. Akibatnya, banyak tindakan yang dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat cenderung bersifat over reactive, tidak tepat sasaran, dan bahkan tidak relevan dengan penanganan COVID-19. Krisis informasi ini menyebabkan dampak sampingan dari situasi krisis yang tidak mudah untuk dikelola.

KOTAK KEGAGALAN IMPLEMENTASI MERESPON INFODEMIK DALAM MERESPON ISU PANDEMIC COVID 19

BEBERAPA FAKTOR KEGAGALAN

- 1.** (Sebutkan dan Jelaskan/bukti)
- 2.** (Sebutkan dan Jelaskan/bukti)
- 3.** (Sebutkan dan Jelaskan/bukti)

KONSEPTUALISASI IMPLEMENTASI

Apa itu implementasi ?

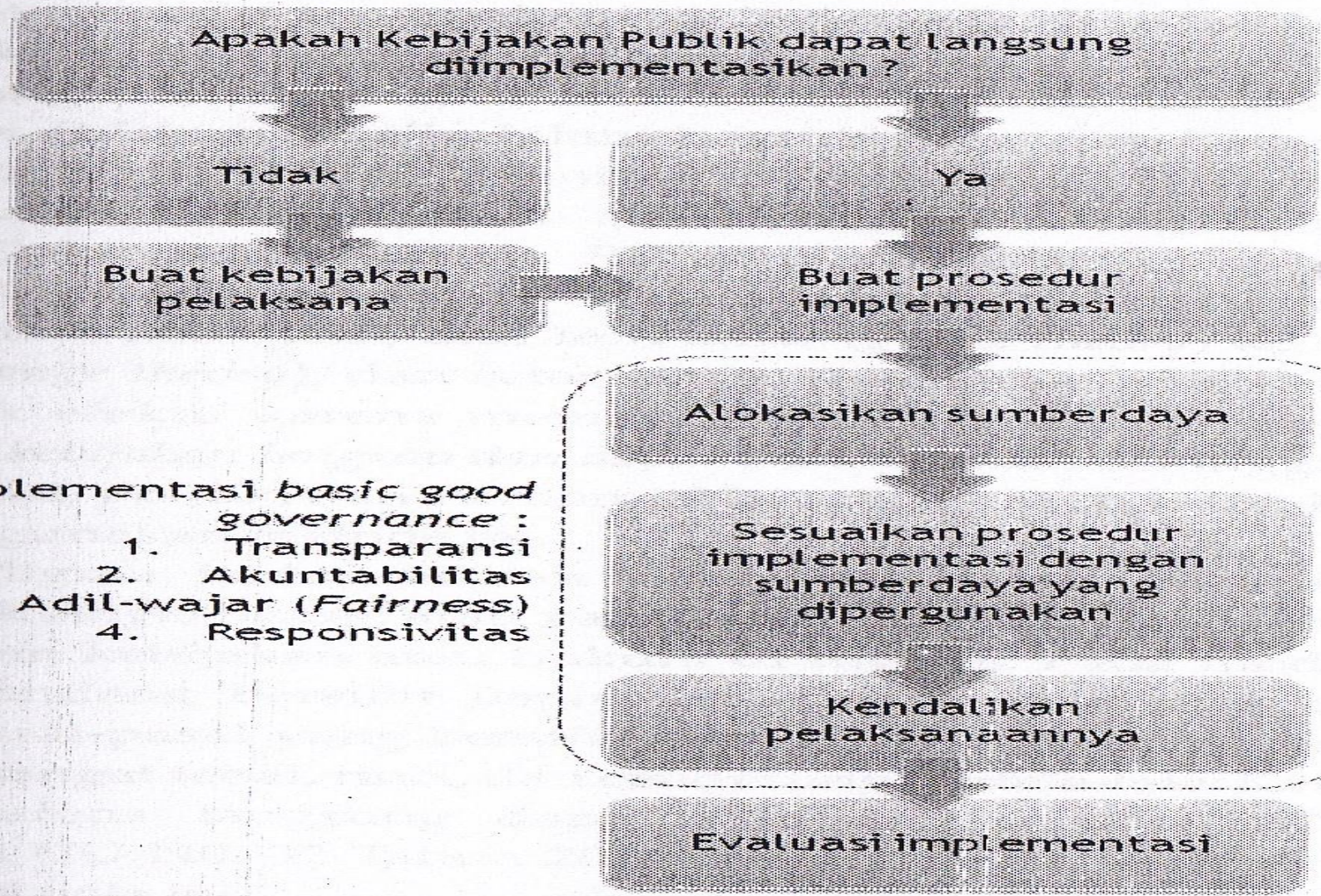
- Van Horn dan Van meter (1975) : *those actions by public and private individual (or groups) that are the achievement or objectives set forth in prior policy* (tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas kebijakan)

Mazmanian & Paul Sabatier

- *Implementation is the carrying out of basic policy decision usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executive orders or court decisions* (implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun bisa pula berbentuk perintah atau petunjuk eksekutif atau keputusan badan peradilan).

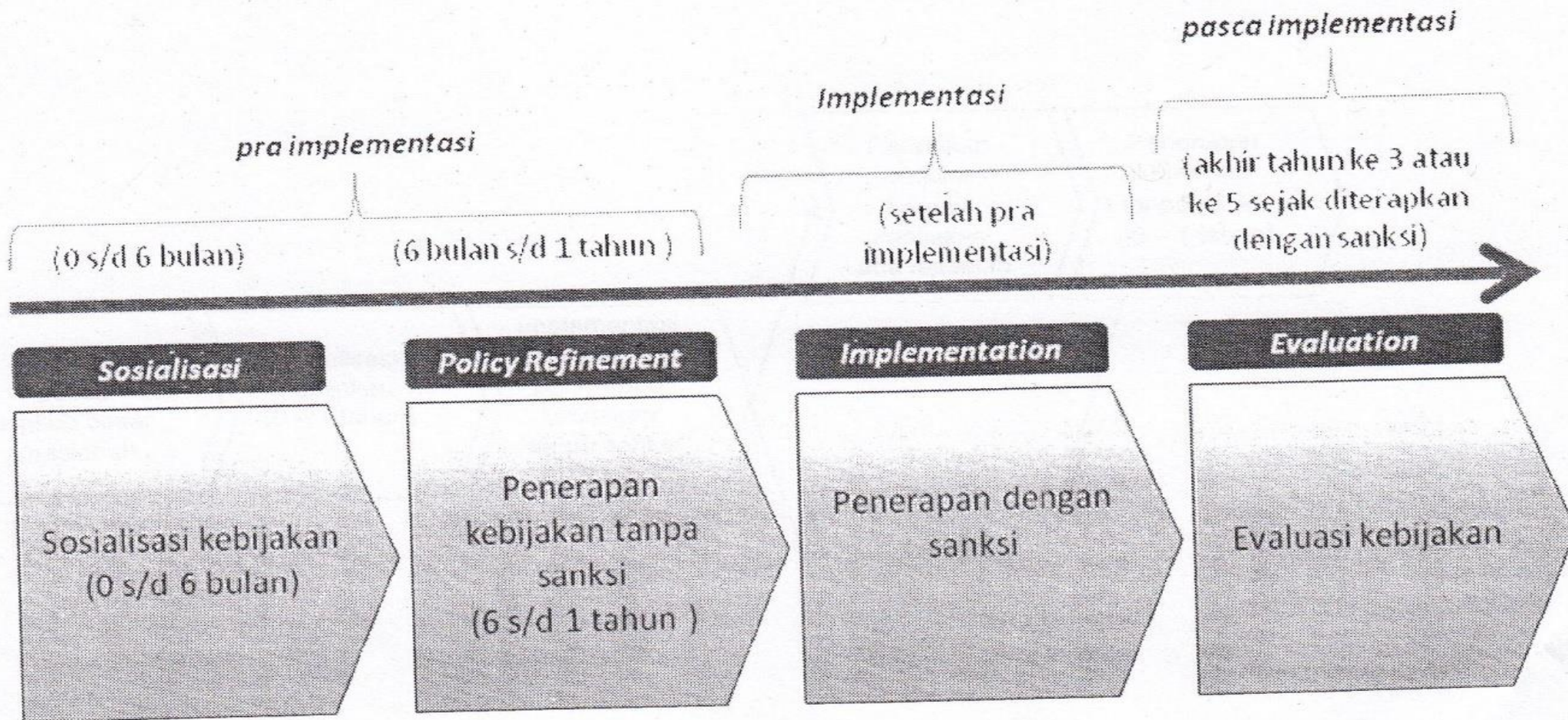
Kesimpulan umum

- Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan
- Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan
- Tujuan kebijakan adalah melakukan intervensi, dan implementasi adalah tindakan intervensi itu sendiri.
- Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk mempengaruhi *street level bureaucracy* (Lipsky) untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku target group.

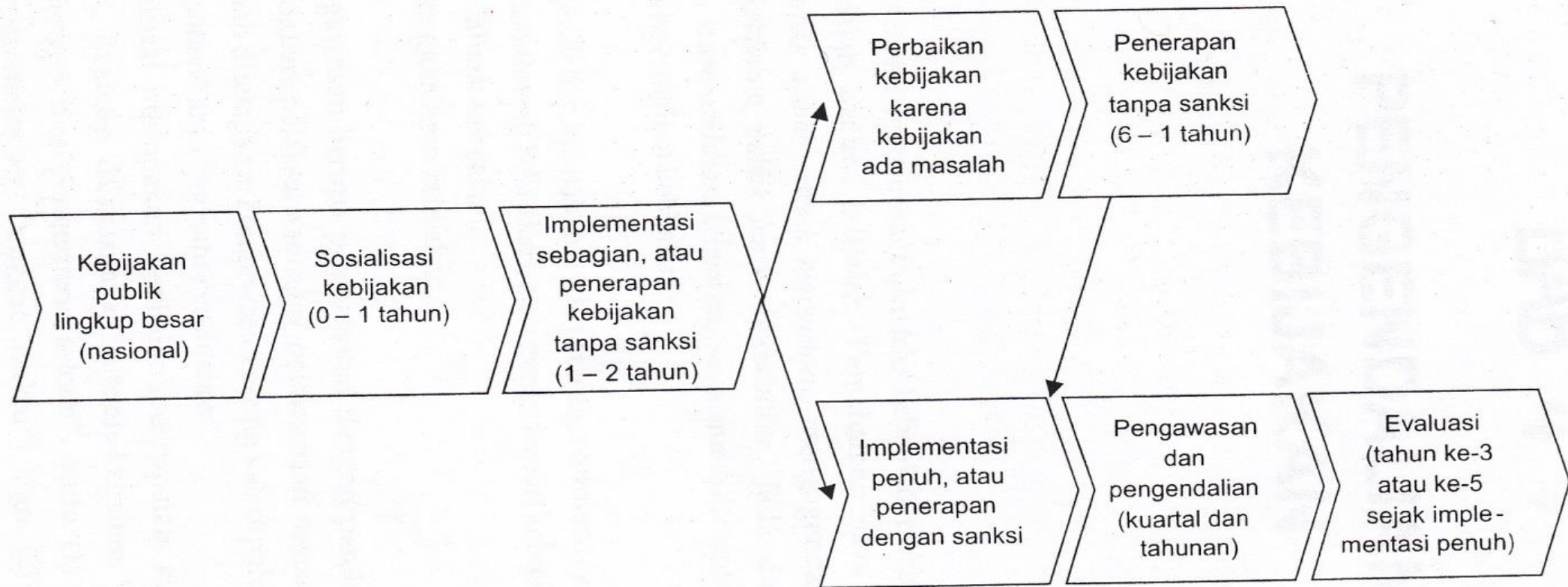


Implementasi *basic good governance* :

1. Transparansi
2. Akuntabilitas
3. Adil-wajar (*Fairness*)
4. Responsivitas



Gambar 3.19 Tahapan Implementasi



Gambar 3.20 *Timing Implementasi*

Gambar :
Perubahan Kondisi Kelompok Sasaran Menggambarkan
Pencapaian Tujuan proses Implementasi

**Miskin dan
Tidak
Sejahtera**



**Makmur
dan
Sejahtera**

IMPLEMENTASI

KONSEP IMPLEMENTASI DLM ARTI SEMPIT

**LOGIKA BERFIKIR DARI ATAS (PIMPINAN-
BAWAHAN/KEBIJAKAN-PELAKSANAAN
LAPANG)**

**COMMAND AND CONTROL : PIMPINAN
MENERJEMAHKAN&MENGAWASI**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DI LAPANGAN
: SESUAI DENGAN COMMAND (PERINTAH)**

Hirarki Implementasi dalam arti sempit (Dinas penda)

KEPALA DINAS : 1) MEMAHAMI TUJUAN KEBIJAKAN 2) MENGKOMUNIKASIKAN KPD KEPALA BIDANG 3) MENGAWASI PELAKSANAAN

KEPALA BIDANG : 1) MEMAHAMI PERINTAH KEPDIS 2) MENGKOMUNIKASIKAN KPD KASUBSI 3) MENGAWASI PELAKSANAAN

KEPALA SUB BIDANG : 1) MEMAHAMI PERINTAH KABID 2) MENGKOMUNIKASIKAN KPD STAF 3) MENGAWASI PELAKSANAAN

STAF GARDA DEPAN : 1) MEMAHAMI PERINTAH KASUB BID 2) MELAKSANAKAN

KELOMPOK SASARAN

Distorasi Komunikasi

PEMAKNAAN IMPLEMENTASI (LUAS)

GRINDLE, 1980

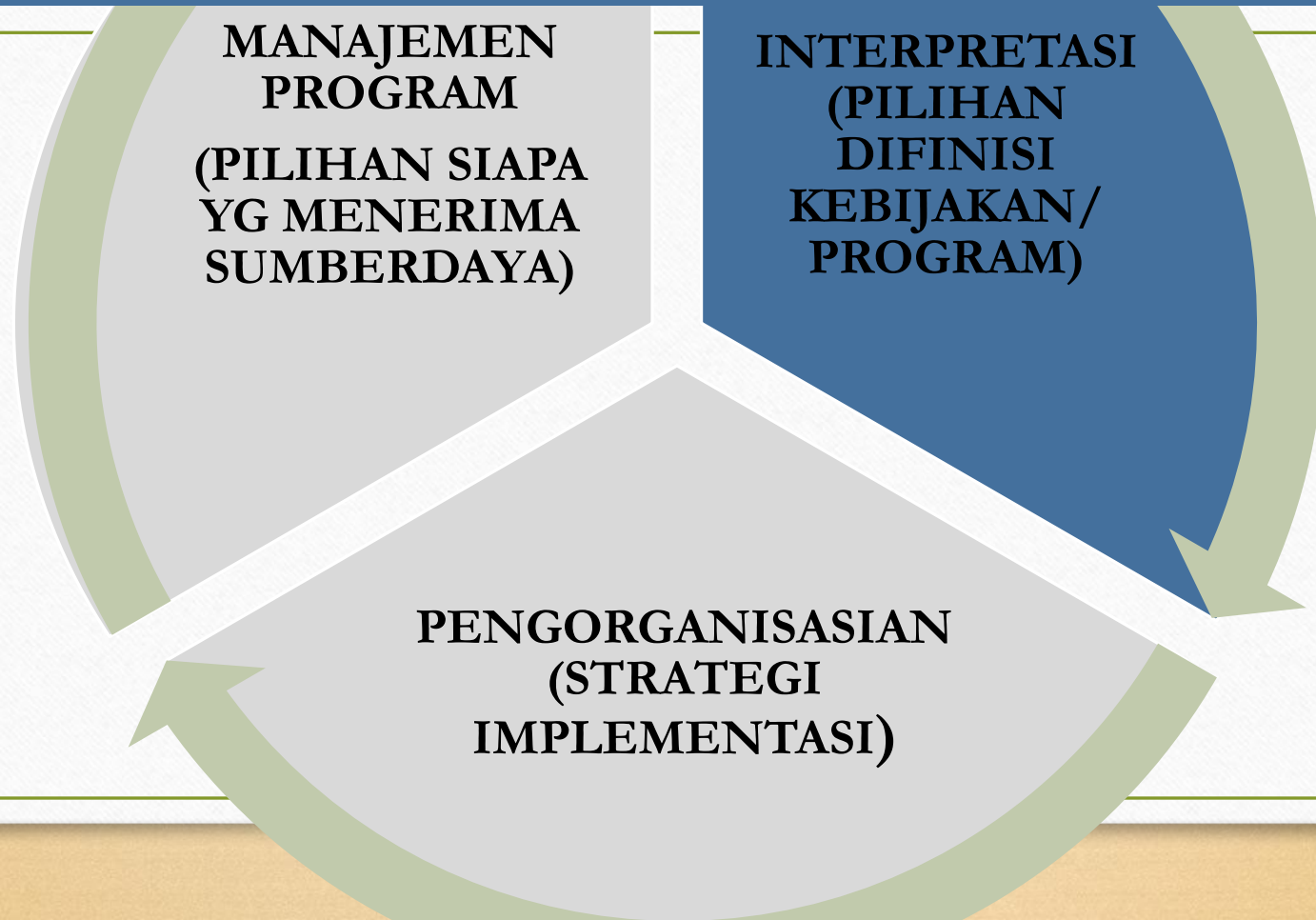
- **MERUPAKAN** KEGIATAN ADMINISTRASI-POLITIK YG BUKAN SEMATA BERKAITAN DGN MEKANISME PENJABARAN KEPUTUSAN POLITIK KE DALAM PROSEDUR RUTIN LEWAT SALURAN BIROKRASI, MELAINKAN MENYANGKUT BANYAK AKTOR PLUS KEPENTINGAN (KONFLIK), MENGAMBIL KEPUTUSAN ATAS 'SIAPA' YANG MEMPEROLEH APA DARI SUATU KEBIJAKAN

IMPLEMENTASI DALAM ARTI LUAS

**MANAJEMEN
PROGRAM
(PILIHAN SIAPA
YG MENERIMA
SUMBERDAYA)**

**INTERPRETASI
(PILIHAN
DIFINISI
KEBIJAKAN/
PROGRAM)**

**PENGORGANISASIAN
(STRATEGI
IMPLEMENTASI)**



3 AKTIVITAS IMPLEMENTASI DALAM ARTI LUAS

- **INTERPRETASI:** menerjemahkan kebijakan/program dalam rencana-rencana tindakan yg dpt dipahami & layak utk dilaksanakan
- **PENGORGANISASIAN:** penetapan/pengaturan thd sumberdaya, satuan organisasi, metode kerja agar menimbulkan hasil tt
- **PENERAPAN (MANAJEMEN PROGRAM) :** penyediaan layanan, biaya, kebutuhan lain utk tercapai tujuan/sasaran kebijakan itu sendiri

PENDEKATAN DLM STUDI IMPLEMENTASI

**IMPLEMENTASI SEBAGAI
SEBAGAI DELIVERY MECHANISM
POLICY OUTPUT**

**IMPLEMENTASI SEBAGAI
SEBUAH STUDI**

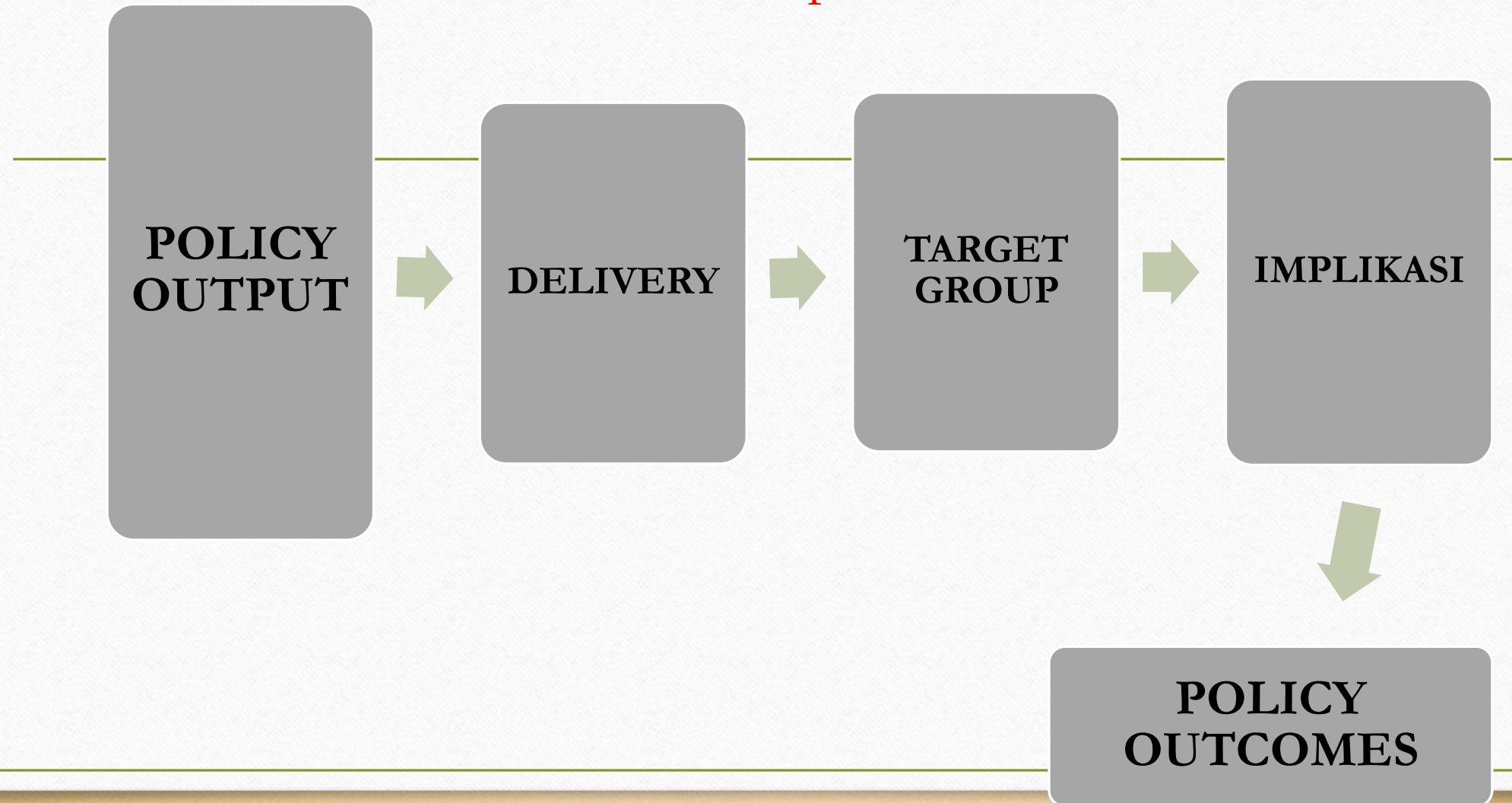
IMPLEMENTASI SBG PROSES

- SEBAGAI *salah satu* tahapan dari serangkaian proses, jembatan melalui tahapan yang dilakukan oleh “delivery mechanism”, yaitu ketika berbagai policy output yang dikonversi dari policy input disampaikan kepada kelompok sasaran
- implementasi dimaknai sebagai *pengelolaan hukum (karena kebijakan telah disyahkan dalam bentuk hukum) dengan mengerahkan semua sumberdaya yang ada agar kebijakan tersebut mampu mencapai atau mewujudkan tujuannya.*

IMPLEMENTASI ADALAH

- **KEGIATAN** untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan.
- Tujuan kebijakan akan muncul manakala policy output diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan dapat diwujudkan.

Gambar. Implementasi sebagai Delivery Mechanism Policy Output



IMPLEMENTASI SEBAGAI SEBUAH STUDI

**IMPLEMENTASI
BERKENAAN DGN
PERSOALAN POLITIK-
ADMINISTRATIF (PROSES)**

**VARIASI
KEBIJAKAN
MENENTUKAN
KEBERHASILAN
IMPLEMENTASI**

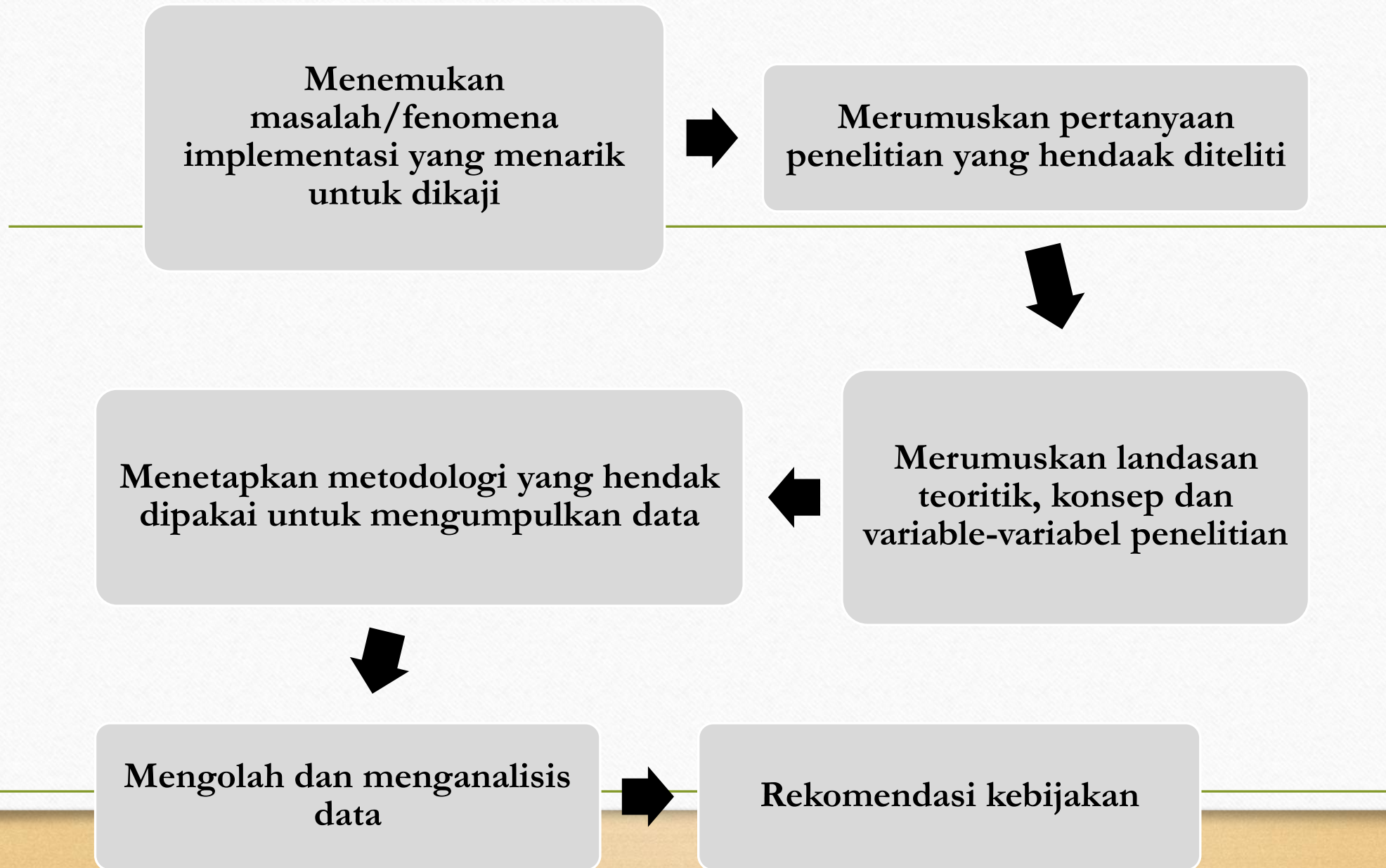
**ADA VARIABEL-
VARIABEL YG
MEMPENGARUHI
KEBERHASILAN
IMPLEMENTASI**



LANJUTAN

- Secara **ontologis** adalah apa yang dipelajari dari implementasi
- Secara **Epistemologi** adalah cara memahami obyek yang dipelajari .
- Secara **aksiologi** mempelajari rekomendasi tindakan yang diperlukan

TAHAPAN IMPLEMENTASI SBG STUDI



TUGAS 1

MATA KULIAH IMPLEMENTASI DAN EVALUASI

Soal-Soal

Mengenali Realitas Implementasi Pandemi Covid 19

NO	REALITAS IMPLEMENTASI PENANGANAN AWAL PANDEMI	REALITAS IMPLEMENTASI SEBELUM PROGRAM VAKSIN	REALITAS IMPLEMENTASI SETELAH PROGRAM VAKSIN